



Artikel

Mengasimilasi Tionghoa Muslim: Kebijakan Pembauran dan Strategi Organisasi Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) 1977-1998

Gita Safitri^{1,*} Imam Subchi²

¹ Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

² Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

* E-mail: gitasafitri.bgr@gmail.com

Citation: Safitri, G. & Subchi, I.

"Mengasimilasi Tionghoa Muslim: Kebijakan Pembauran Organisasi Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) 1977-1998". *Socio Historica* 2022, Vol. 1, No. 1. DOI:

<https://doi.org/10.15408/sc.v1i1.25793>

Publisher's Note: Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This article examines the organizational strategy of the Communication Forum for National Unity (BAKOM-PKB) in the process of assimilation from 1977-1998. This research includes the history of the development of BAKOM-PKB to its strategy in implementing the assimilation policy from 1977-1998. This study uses historical research methods, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. This research also uses a social approach and primary sources in the form of documents published by the agency and the state gazette on assimilation policies. The results of this study indicate that BAKOM-PKB is a universal mass organization and was inaugurated by the Ministry of Home Affairs in 1977. This agency aims to be a forum for thought and research to provide input to the government and society on the issue of assimilation. BAKOM-PKB places greater emphasis on assimilation to all aspects of people's lives through information about the idea of assimilation in discussions, training, and print media, in carrying out its duties. In addition, the existing assimilation policy can create a relationship between BAKOM-PKB and Chinese Muslim community institutions with the same vision in assimilation.

Keywords: BAKOM-PKB, Assimilation Process, Ethnic Chinese, Chinese Muslim community institutions.

Abstrak: Artikel ini meneliti tentang strategi organisasi Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) dalam proses Asimilasi tahun 1977-1998. Penelitian ini meliputi sejarah perkembangan BAKOM-PKB hingga strateginya dalam upaya menerapkan kebijakan asimilasi dalam kurun tahun 1977-1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosial dan menggunakan sumber primer berupa dokumen yang diterbitkan oleh badan tersebut, dan lembaran negara tentang kebijakan asimilasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAKOM-PKB merupakan organisasi massa yang universal serta diresmikan oleh Departemen Dalam Negeri pada tahun 1977. Badan ini memiliki tujuan sebagai wadah pemikir dan penelitian untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai masalah pembauran. BAKOM-PKB dalam menjalankan tugasnya lebih menekankan upaya pembauran kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui penerangan tentang gagasan pembauran dalam diskusi, pelatihan maupun media cetak. Selain itu kebijakan asimilasi yang ada mampu menciptakan hubungan antara BAKOM-PKB dengan lembaga masyarakat Tionghoa Muslim yang memiliki kesamaan visi dalam asimilasi.

Kata Kunci: BAKOM-PKB, Proses Asimilasi, Etnis Tionghoa, lembaga masyarakat Tionghoa Muslim.

1. Pendahuluan

Keberadaan etnis Tionghoa erat dengan fenomena sentimen anti Tionghoa di Indonesia yang berlanjut hingga masa kebangkitan nasional pada awal abad ke dua puluh. Ketika itu etnis Tionghoa berusaha mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia dengan turut berpartisipasi aktif dalam membangun nasionalisme bersama orang pribumi. Hal itu dilakukan sebagai upaya asimilasi agar etnis Tionghoa diterima oleh orang pribumi sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Berbagai partai besar berdiri seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berdiri tahun 1927, Partai Indonesia (Partindo) yang berdiri tahun 1931, Partai Nasional Indoneisa (PNI) Baru yang berdiri tahun 1931, dan Partai Indonesia Raya (Parindra) yang berdiri tahun 1935, semua partai tersebut menutup keanggotaannya bagi penduduk non pribumi.¹ Etnis Tionghoa masih dianggap sebagai orang asing meskipun telah berusaha keras menjadi orang Indonesia dengan berpartisipasi dalam perjuangan Indonesia melalui partai.

Keterasingan seringkali dialami oleh etnis Tionghoa dalam mendefinisikan identitasnya. Setelah kemerdekaan, pemerintah Orde Lama membuat kebijaksanaan terhadap minoritas Tionghoa melalui perundingan Meja Bundar pada tahun 1949 yang mengangkat masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Menurut ketentuan dalam perundingan tersebut, etnis Tionghoa diberi kebebasan dalam memilih kewarganegaraannya. Keputusan ini akhirnya membagi mereka dalam dua kelompok yaitu kalangan Tionghoa peranakan yang cenderung memilih Indonesia dan kalangan Tionghoa totok atau asli yang cenderung memilih Tiongkok.² Namun keputusan ini menjadi latar belakang dari lahirnya kebijakan baru yaitu penandatanganan perjanjian dwi kewarganegaraan pada tahun 1955 yang berisi peraturan mengenai etnis Tionghoa yang oleh hukum Indonesia dianggap berkewarganegaraan Indonesia juga diklaim berkewarganegaraan Tiongkok menurut hukum Tiongkok.³

Krisis identitas yang dialami oleh etnis Tionghoa puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini diberlakukan kebijakan yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Di dalam perundangundangan, kebijakan yang mengarah pada diskriminasi dapat dibagi menjadi lima hal di antaranya diskriminasi melalui kartu identitas (KTP), pelarangan menggunakan nama Tionghoa, pembatasan menggunakan bahasa Tionghoa di ranah publik, pembatasan akses dalam mengenyam pendidikan, dan pembatasan kesempatan dalam sektor ekonomi.⁴ Kebijakan yang diskriminatif tersebut membuat etnis Tionghoa semakin merasakan dilema dan terkikis dari identitas aslinya terlebih ketika pemerintah mencanangkan kebijakan asimilasi total bagi etnis Tionghoa agar melebur dengan masyarakat lokal. Pada saat itu telah ada dua kelompok yang memiliki kecenderungan berbeda yaitu Baperki dan LPKB. Baperki atau Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia berdiri pada bulan Maret 1954 yang diketuai oleh Siaw Giok Tjhan yang menganjurkan konsep integrasi bagi etnis Tionghoa. Sedangkan LPKB atau Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa merupakan lembaga yang didirikan pada tahun 1961 yang diketuai oleh Junus Jahja. Lembaga ini dijadikan pemerintah sebagai alat penganjur etnis Tionghoa untuk berasimilasi menyatu dengan pribumi. Kedua lembaga ini seringkali mengalami perdebatan yang membuat etnis

1. Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafiti Press, 1984), 4.

2. Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 25.

3. Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, 123.

4. Samsul Huda, "Orang Indonesia Tionghoa Dan Persoalan Identitas," *Kontekstualita* 25, no. 1 (2010): 166.

Tionghoa semakin dilema dan akhirnya terpecah menjadi dua kelompok yang masing-masing berpihak pada salah satu lembaga tersebut.⁵

Pasca Baperki dibubarkan pada tahun 1967 sejalan dengan kebijakan Orde Baru terhadap penghapusan segala hal mengenai etnis Tionghoa, LPKB semakin gencar dalam menganjurkan asimilasi kepada etnis Tionghoa agar melebur dengan masyarakat lokal melalui jalan mengidentifikasi mereka dengan keagamaan yang ada. Pembubaran Baperki merupakan atas dasar anjuran LPKB dalam edaran pers mereka tahun 1965. Selain dianggap sebagai simpatisan komunis, LPKB menilai bahwa Baperki harus dibubarkan sebab jika Baperki masih berdiri, maka pertentangan rasial akan tetap ada. Hal ini akan sangat membahayakan bagi revolusi Indonesia.⁶ Namun peran tersebut tidak lama, LPKB turut dibubarkan pemerintah pada bulan November 1967. LPKB dianggap telah mencapai hasil terbesar dalam kebijakan asimilasi. Dengan demikian, tugasnya sebagai penganjur asimilasi akhirnya dialihkan kepada Departemen Dalam Negeri.⁷

Pembubaran LPKB tersebut hingga pengalihan tugas kepada Departemen Dalam Negeri tidak menghentikan pemerintah dalam melanjutkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Melalui Departemen Dalam Negeri, asimilasi masih terus dijadikan sebagai agenda penting bagi pemerintah. Di dalam departemen tersebutlah lahir banyak lembaga yang seringkali dijadikan sebagai penyambung kebijakan asimilasi yang pernah oleh LPKB. Namun kehadirannya masih dianggap belum secara tuntas menyelesaikan permasalahan pekerjaan rumah yaitu masalah mengenai pembauran etnis Tionghoa.⁸

Sejalan dengan hadirnya berbagai lembaga yang dibentuk oleh Departemen Dalam Negeri, dalam perkembangannya satu per satu dibubarkan. Namun terdapat satu lembaga yang kemudian dibentuk dan dijadikan alat berikutnya bagi pemerintah sebagai penganjur kebijakan asimilasi. Lembaga tersebut adalah BAKOM-PKB merupakan akronim dari Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa yang didirikan tahun 1977. Melalui badan inilah kemudian kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru semakin digencarkan kembali seperti sebelumnya. Keberadaan badan ini kemudian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan asimilasi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Selain itu adanya relasi dengan lembaga masyarakat Tionghoa Muslim seperti Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Yayasan Ukhuwah Islamiyah yang juga memiliki andil dalam penerapan kebijakan asimilasi ini. Lalu bagaimana strategi dan tantangan terkait upaya yang dilakukan BAKOM-PKB dalam mengimplementasikan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa dalam kurun waktu 1977-1998?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode historis, diantaranya tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan heuristik⁹, penulis melakukan studi kepustakaan dan observasi wawancara. Penulis mengumpulkan berbagai sumber yang bersifat primer serta sekunder. Adapun sumber primer, penulis menggunakan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah, dokumen-dokumen milik BAKOM-PKB, serta majalah yang diterbitkan oleh BAKOM-PKB dalam kurun waktu 1977-1998. Adapun sumber-sumber tersebut ialah

5. Junus Jahja, *Islam Di Mata WNI* (Jakarta: Yayasan H. Abdulkarim Oei, 1993), 47-49.

6. Junus Jahja, *Garis Rasial Garis Usang: Lika-Liku Pembauran* (Jakarta: BAKOM-PKB Pusat, 1983), 21-22.

7. Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 268-270.

8. Tony Suryo Santoso, *Sekitar Pembauran Bangsa Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66, 1985), 166.

9. Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999), 54.

Kumpulan ketetapan MPR RI yang memuat mengenai GBHN atau TAP MPR No. IV/MPR/1978, TAP MPR No. II/MPR/1983, TAP MPR No. II/MPR/1988, dokumen keputusan Presiden RI dan keputusan Kementerian Dalam Negeri, dokumen panduan pelatihan pembauran yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, dokumen Gagasan dan Pemikiran BAKOM-PKB serta Majalah Pembauran: Terbitan Berkala Edisi 1-29 yang diterbitkan oleh BAKOM-PKB. Sedangkan untuk sumber sekunder, penulis mendapatkan karya akademik yang relevan dengan topik penelitian ini serta jurnal-jurnal yang relevan. Sumber-sumber tersebut didapatkan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Salemba, Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu penulis juga memanfaatkan website pemerintah dalam mengunduh dokumen-dokumen tersebut serta portal jurnal-jurnal online seperti yang terdapat di e-resources.perpusnas.go.id, jstor.org, doaj.org, scholar.google.com, researchgate.net, garuda.ristekbrin.go.id, neliti.com, dan lain-lain.

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kritik sumber yang menguji tentang sumber-sumber yang telah didapatkan. Adapun dalam tahapan ini terdapat dua teknik yang dapat digunakan yaitu teknik keaslian sumber (otentisitas) dan teknik kesahihan sumber (kredibilitas). Teknik pertama yaitu teknik keaslian sumber, dimana penulis melakukan pengujian atas keaslian dengan cara menyeleksi segi fisik dari sumber yang ditemukan.¹⁰ Dalam hal ini penulis menguji sumber primer berupa Kumpulan ketetapan MPR RI yang memuat mengenai GBHN atau TAP MPR No. IV/MPR/1978, TAP MPR No. II/MPR/1983, TAP MPR No. II/MPR/1988, dokumen keputusan Presiden RI dan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Sumber-sumber primer tersebut merupakan milik pemerintah yang termuat dalam website pemerintah. Kemudian ditemukan juga *Majalah Pembauran: Terbitan Berkala* Edisi 1-29. Dalam *Majalah Pembauran: Terbitan Berkala* ini merupakan majalah yang diterbitkan rutin setiap bulan. Majalah ini dipublikasikan oleh Yayasan Tunas Bangsa yang merupakan yayasan di bawah naungan organisasi BAKOM-PKB. Penulis menemukan edisi pertama hingga edisi ke dua puluh sembilan dalam bentuk cetak. Edisi-edisi yang ditemukan tersebut mulai diterbitkan pada bulan Oktober 1978 hingga bulan Desember 1981.

Kemudian teknik kedua yaitu teknik kesahihan sumber yang menguraikan bukti atau informasi apakah yang ada di dalam sumber-sumber tersebut untuk menetapkan sah atau tidaknya sumber.¹¹ Dalam dokumen kumpulan ketetapan MPR RI terdapat ketetapan yang menjadi dasar kebijakan asimilasi oleh pemerintah yaitu GBHN atau TAP MPR No. IV/MPR/1978, TAP MPR No. II/MPR/1983, TAP MPR No. II/MPR/1988. Kemudian dokumen keputusan milik pemerintah mengenai Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina, Keputusan Presiden No. 240 tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat. Kemudian Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477 tahun 1978 tentang agama-agama yang diakui oleh pemerintah, serta dokumen pedoman pelatihan pembauran bangsa yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri yang berisikan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pembauran di tingkat daerah. Kemudian yang terakhir ialah *Majalah Pembauran: Terbitan Berkala* berisikan mengenai artikel-artikel yang ditulis oleh anggota BAKOM-PKB, peraturan-peraturan pemerintah yang pernah dikeluarkan pada masa itu, Anggaran Dasar dan Anggaran RUMah Tangga (AD dan ART) BAKOM-PKB, serta notulensi-notulensi BAKOM-PKB. Sumber-sumber primer tersebut dapat dikatakan sebagai sumber yang sah atau

10. Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 59.

11. Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 61.

kredibel sebab seluruh sumber berasal dari lembaga pemerintahan terkait dan organisasi BAKOM_PKB langsung. Sehingga informasi yang terkandung dalam seluruh sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan keaslian serta kebenarannya.

Berikutnya adalah tahapan interpretasi yaitu tahapan yang menafsirkan atau menganalisis fakta-fakta yang didapatkan melalui sumber-sumber sejarah dengan memaparkan sebab akibat dari peristiwa sejarah.¹² Dalam tahapan ini penulis berupaya mengolah sumber serta data yang telah dihimpun yaitu dengan memadukan antara sumber yang berasal dari penelusuran kepustakaan dan sumber yang berasal dari observasi wawancara. Kemudian penulis memaparkan sebab akibat dari persoalan kebijakan asimilasi yang dilakukan oleh organisasi BAKOM-PKB. Pada tahap ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi dalam memandang permasalahan tersebut. Tahapan terakhir yaitu tahapan historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini merupakan tahapan yang menuliskan, memaparkan atau mengungkapkan hasil dari penelitian sejarah yang telah dilakukan.¹³ Dalam tahapan ini penulis akan menyusun fakta-fakta sejarah yang ditemukan serta menuliskannya sebagai hasil penelitian sejarah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Strategi Penerapan Asimilasi dalam Program Penerangan Organisasi BAKOM-PKB

Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) merupakan badan yang berdiri sebagai tindak lanjut dari Pekan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa pada bulan Juli 1977. BAKOM-PKB dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pada tanggal 31 Desember 1977 yang anggotanya Hasyim Ning, Abdjan Sulaiman, R Safiudin, Ridwan Saidi, Sindhunatha, Junus Jahja, Njoo Han Siang, dan Lo SH Ginting.¹⁴ Badan yang diketuai oleh Sindhunatha ini bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri dalam rangka menggalakkan pembauran di kalangan masyarakat Tionghoa. BAKOM-PKB tidak memiliki anggota dan tidak operasional dengan kata lain dalam badan ini hanya dikenal istilah pengurus. Di BAKOM-PKB Pusat terdiri atas 10 orang pribumi dan 7 non pribumi. Mereka adalah tokoh-tokoh ketiga unsur kontestan pemilu, ormas-ormas, pengusaha-pengusaha besar yang diangkat berdasarkan SK Mendagri.¹⁵ Tujuan didirikannya badan ini pun sebagai wadah pemikir dan penelitian untuk memberikan masukan kepada pemerintah serta masyarakat mengenai masalah pembauran bangsa.¹⁶

Penerapan kebijakan asimilasi yang dilakukan oleh BAKOM-PKB merupakan manifestasi dari beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah Orde Baru. Seperti yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAP MPR No. IV/MPR/1978 yang di dalamnya memuat gagasan penting dari pembauran dalam bidang kebudayaan poin 3e yang berbunyi: "*Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.*"¹⁷ Kemudian landasan pokok kebijakan asimilasi ini diperbaharui dalam GBHN TAP MPR No. II/MPR/1983 di bidang kebudayaan poin 3e yang berbunyi: "*Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial*

12Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 64.

13Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 67.

14. Prasetyadji, *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis: Merintis Jalan Menuju Kesetaraan Dan Penyelesaian Kewarganegaraan Tionghoa Sejak Tahun 1945* (Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, 2011), 47.

15. Junus Jahja, *Catatan Seorang WNI: Kenangan, Renungan, Dan Harapan* (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1989), 113.

16. BAKOM-PKB, "Peraturan Dasar Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa," *Pembauran: Buletin Berkala*, June 1979.

17. Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Himpunan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (1960-1988)* (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1989), 553.

dan budaya, dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional.”¹⁸ Ketetapan ini menjadi dasar atas lahirnya beberapa kebijakan tentang asimilasi di masa pemerintahan Orde Baru seperti Instruksi Presiden No. 2 tahun 1980 mengenai Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Keputusan Presiden No. 13 tahun 1980 tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Indonesia yang menjadi perhatian bagi BAKOM-PKB.

BAKOM-PKB sebagai organisasi massa yang membawa semangat kesatuan bangsa serta menganut ideologi asimilasi. Meskipun Bakom merupakan organisasi yang independen dan mandiri secara finansial, Bakom menjadi pilar penting bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan asimilasi. Bakom memiliki program penerangan kepada masyarakat. Program penerangan ini merupakan program utama bagi Bakom. Melalui program ini Bakom sering berkunjung ke daerah-daerah untuk memberikan penerangan seputar ide-ide pembauran dalam masyarakat. Selain itu terdapat diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh Bakom yang bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat seperti tingkat kelurahan. Diskusi-diskusi ini merupakan media bagi Bakom dalam menebarkan ide-ide pembauran di tengah masyarakat luas.¹⁹

Sekitar tahun 1980-an, Bakom sedikit meredup dalam melakukan penerangan maupun menjalankan kebijakan pembauran di tengah masyarakat. Namun penerangan seputar ide-ide pembauran tetap aktif dilakukan dengan membentuk sebuah lembaga penelitian ilmiah tentang sejarah pembauran bangsa dan masalah keturunan Tionghoa. Pada tanggal 28 Oktober 1987, tepat pada peringatan ke-10 tahun, BAKOM-PKB dengan Yayasan Tunas Bangsa mendirikan Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran Bangsa (LPMP). Lembaga ini dipimpin oleh Drs. H. Junus Jahja sebagai Direktur, Drs. H. Ridwan Saidi sebagai Wakil Direktur, dan Bunyamin Wibisono sebagai sekretaris. Melalui LPMP inilah diharapkan masyarakat dapat lebih baik dalam mengadakan pemantauan, mengevaluasi keadaan, mengembangkan serta menyebarkan gagasan pembauran bangsa dalam rangka wawasan kebangsaan Indonesia. Lembaga ini juga memiliki tugas untuk mengadakan dokumentasi tulisan-tulisan mengenai pembauran bangsa dan masalah Tionghoa di Indonesia serta di berbagai negara Asia Tenggara.²⁰ Melalui LPMP juga hal-hal teknis mengenai gagasan pembauran ditebarkan sebagai media keberlanjutan dari usaha-usaha yang dilakukan para pengurus Bakom yang sudah lanjut usia dan tidak seaktif seperti 10 tahun silam.²¹ Dengan demikian, pada dasarnya lembaga ini bersifat sebagai media institusi ilmiah dan penyebar hasil evaluasi serta gagasan pembauran sebagai bahan pelengkap bagi yang memerlukannya.

Bakom yang lebih menekankan penerangan tentang gagasan pembauran terhadap masyarakat dinilai lebih memiliki kemampuan untuk menjembatani komunikasi tentang kebijakan yang ada kepada masyarakat dengan cara yang lebih persuasif daripada pemerintah yang terkesan memaksakan setiap diawal kebijakan asimilasinya. Dengan berdasarkan atas GBHN, Bakom merumuskan setiap pemikiran-pemikiran, evaluasi, dan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pembauran antara masyarakat Tionghoa Indonesia dengan masyarakat lokal. Seluruh aspek bidang kehidupan lebih ditekankan oleh Bakom dalam menerangkan usaha pembauran dapat dipaparkan secara ringkas sebagai berikut:

18. Lembaga Pemilihan Umum, *Pemilihan umum 1987* (Lembaga Pemilihan Umum, 1988), 88.

19. Ridwan Saidi, “Sejarah Perkembangan BAKOM-PKB Dalam Penerapan Kebijakan Asimilasi Dan Keterkaitannya Dengan Lembaga-Lembaga Muslim Tionghoa,” July 29, 2021.

20. Ridwan Saidi, *Baba Bisa Menjadi Indonesier: Bung Hatta, Liem Koen Hian, Dan Sindhunatha, Menyorot Masalah Cina Di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1988), 22.

21. Ridwan Saidi, “Sejarah Perkembangan BAKOM-PKB Dalam Penerapan Kebijakan Asimilasi Dan Keterkaitannya Dengan Lembaga-Lembaga Muslim Tionghoa,” July 29, 2021.

1. *Pembauran di Bidang Kehidupan Bernegara*

Bakom memiliki pemikiran bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan berhak mendirikan ikatan atau organisasi guna untuk mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab. Selain itu untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional disyaratkan kemantapan akan pemahaman tentang kehidupan politik dan kenegaraan berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian untuk memperlancar proses pembauran secara efektif maka harus ditiadakan segala hambatan yang timbul dari dalam maupun luar dengan selalu memupuk ketahanan nasional.

2. *Pembauran di Bidang Ekonomi*

Salah satu keresahan yang hidup dalam masyarakat adalah mengenai ketimpangan secara ekonomi. Untuk itu masalah pemerataan pendapatan merupakan suatu tantangan utama bagi semua. Kemudian dalam meningkatkan kemampuan berusaha maka perlu adanya suatu pendidikan kewiraswastaan yang ditujukan pada pengusaha kecil.

3. *Pembauran di Bidang Sosial Budaya*

Penghayatan kesatuan bangsa di bidang sosial budaya tidak terpisahkan dengan bidang lainnya yang secara keseluruhan merupakan rangkuman dari pergaulan hidup sosial masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya merupakan syaraf dari pergaulan sosial masyarakat. Nilai-nilai lahir dan menjelma dari suatu lingkungan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai sosial budaya harus meliputi seluruh bangsa secara merata dan selaras. Pergaulan hidup masyarakat harus benar-benar memasyarakat dan membudaya. Hal ini berarti bahwa asimilasi dapat terwujud secara nyata dari struktur kemasyarakatan Indonesia dan terpancarkan oleh tingkah laku sehari-hari. Tingkah laku ini harus secara nyata ditunjukkan dalam bidang pendidikan, olahraga, kesenian, kegiatan beragama, maupun adat istiadat. Itulah sebabnya penghayatan kesatuan bangsa hendaknya menitikberatkan pada pembinaan asimilasi di kalangan generasi muda yang kelak akan menciptakan kader-kader yang berperan dalam usaha pembinaan penghayatan kesatuan bangsa.

4. *Pembauran di Bidang Pergaulan*

Masalah eksklusivisme di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia menjadi hambatan dalam proses asimilasi. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha konkrit untuk meningkatkan pergaulan di semua lapisan masyarakat seperti kampanye penerangan melalui semua media massa, pergaulan dapat ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, olahraga, kesenian dan lain-lain.²²

Berbagai pemikiran Bakom tentang asimilasi diimplementasikan melalui penerangan kepada masyarakat luas. Namun dalam proses membaurkan bangsa terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat keturunan Tionghoa Indonesia, dan masyarakat lokal. Sindhunata sebagai ketua BAKOM-PKB dalam ceramahnya di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada tanggal 30 Juni 1983 memaparkan bahwa di dalam kelompok masyarakat keturunan masih terdapat penggolongan atas kelompok yang sudah membaur, kelompok yang masih ragu, dan kelompok yang telah siap membaur. Selanjutnya, masyarakat lokal masih memandang golongan masyarakat Tionghoa Indonesia sebagai suatu kelompok masyarakat yang tunggal semata-mata karena prasangka serta stereotip yang berbeda. Kemudian pemerintah umumnya masih menganggap kelompok masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat yang homogen sehingga terjadi generalisasi dalam setiap kebijakan yang memicu sikap diskriminasi dari pemerintah terhadap keturunan Tionghoa.²³ Meskipun kehadiran Bakom serta ide-ide

22. BAKOM-PKB, "Bahan-Bahan Pemikiran Mengenai Bidang-Bidang BAKOM-PKB," *Pembauran*, June 1979.

23. Babari, "Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pembauran Bangsa," *Analisa CSIS: Pembauran dan Tantangannya*, 1984.

pembaurannya yang ditebarkan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan program negara terkait kebijakan asimilasi, namun Bakom tidak menemukan hambatan dalam penerangan ide tersebut.²⁴

Permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses asimilasi justru datang dari pengimplementasian dalam masyarakat itu sendiri, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat Tionghoa Indonesia, dan pemerintah sebagai perumus kebijakan. Berbagai bidang kehidupan yang menjadi fokus dalam proses asimilasi memiliki hambatannya masing-masing di antaranya masyarakat Tionghoa Indonesia masih bersikap eksklusif terhadap sekitar dan cenderung mempertahankan tradisi leluhur, masyarakat Tionghoa Indonesia diidentifikasi sebagai golongan ekonomi yang kuat dibanding masyarakat lokal sehingga menimbulkan stereotip atau prasangka negatif bila terjadi kenaikan harga di pasar. Kemudian perlakuan diskriminasi akibat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga turut menghambat jalannya proses asimilasi seperti dalam mengurus Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI).²⁵ Dengan demikian, badan pendamping pemerintah dalam hal ini yaitu BAKOM-PKB telah melaksanakan tugas serta fungsinya dalam upaya pembauran sehingga lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa telah berhasil membantu dalam proses pemberian SBKRI sejumlah 496.030 orang yang tersebar di daerah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Barat.²⁶

Instruksi Presiden No. 2 tahun 1980 yang hanya berlaku dalam waktu dan wilayah terbatas menyebabkan kurang meratanya kepastian mengenai status kewarganegaraan bagi masyarakat Tionghoa. Masih ada persoalan lain tentang warga negara asing termasuk warga Tionghoa yang telah lama bermukim di Indonesia. Tercatat dalam data milik Biro Pusat Statistik di Indonesia pada tahun 1981, penduduk yang berasal dari kalangan berkewarganegaraan asing dalam kategori warga RRC, Taiwan maupun Tionghoa yang stateless berjumlah 462.314 orang dan penduduk yang berasal dari warga negara asing lainnya berjumlah 51.238 orang.²⁷ Sedangkan pada tahun 1995, data dari Biro Pusat Statistik mencatat sekitar 219.151 orang dikategorikan sebagai orang asing yang berdiam tetap di Indonesia berasal dari wilayah Asia, Amerika, Eropa, Australia, Eropa, dan Afrika, sekitar 217.595 orang berasal dari wilayah Asia.²⁸

Kondisi seperti ini melatarbelakangi BAKOM-PKB bersama Yayasan Prasetya Mulia (YPM) untuk meyakinkan pemerintah, dalam hal ini yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman untuk menerbitkan kembali peraturan seperti itu. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dikeluarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1995 tentang Percepatan Proses Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing Cina Pemukim. Inpres ini dikenal dengan proses naturalisasi satu atap.²⁹ Inpres ini substansinya seperti percepatan dalam proses naturalisasi yakni hingga bulan Maret 1996 harus selesai. Setelah dikeluarkan Inpres tersebut dibentuk TP4C (Tim Pelaksana Percepatan Pewarganegaraan Pemukim China) yang keanggotaannya merupakan BAKOM-PKB dan YPM. Realisasinya dalam pelaksanaannya BAKOM-PKB dan YPM dibantu oleh BAKOM-PKB daerah serta

24. Ridwan Saidi, "Sejarah Perkembangan BAKOM-PKB Dalam Penerapan Kebijakan Asimilasi Dan Keterkaitannya Dengan Lembaga-Lembaga Muslim Tionghoa."

25. Babari, "Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pembauran Bangsa."

26. Prasetyadji, *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis: Merintis Jalan Menuju Kesetaraan Dan Penyelesaian Kewarganegaraan Tionghoa Sejak Tahun 1945*, 77.

27. Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi: Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Penduduk 1980* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1981), 18-19.

28. Bagian Evaluasi dan Laporan Statistik, *Statistik Indonesia 1995: Statistical Yearbook of Indonesia 1995* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1995), 45.

29. Mega Christina, *SBKRI No Way Untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi* (Jakarta: Yappika, 2006), 30.

organisasi-organisasi masyarakat hingga berhasil membantu sekitar 230.000 warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.³⁰ Dengan demikian, usaha-usaha dalam penyelesaian permasalahan Tionghoa sejatinya dilakukan dengan kebersamaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah, melalui Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Sosial Politik, terus berupaya meningkatkan proses percepatan asimilasi di tengah masyarakat luas. Pada tahun 1993, sebuah pedoman pelatihan pembauran diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman untuk mencetak para tenaga yang handal serta memiliki kompetensi dalam melatih, memberikan bantuan teknis, serta melaksanakan tugasnya dalam membantu pemerintah dalam mengusahakan peningkatan peran RT/RW dalam proses pembauran. Materi-materi pelatihan dalam pedoman ini di antaranya program pembauran bangsa, pembinaan kesatuan bangsa, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4), mekanisme RT/RW, kegotong-royongan, program pembangunan, dan pemecahan masalah. Pelatihan ini dilaksanakan selama lima hari secara efektif dengan mengusahakan sedikit ceramah dan merangsang keterlibatan peserta dalam proses latihan. Para peserta terdiri dari Staf Direktorat Sosial Politik (DITSOSPOL), Staf Biro Bina Pemerintahan Desa (PEMDES), Staf Direktorat Pembanguana Desa (DITBANGDES), Staf Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD), Staf Kanwil Departemen Agama (DEPAG), Staf Kanwil Departemen Sosial (DEPSOS), dan seorang pengurus BAKOM-PKB.³¹ Baik pemerintah maupun berbagai swasta turut melaksanakan kegiatan dalam rangka percepatan proses pembauran ini telah sungguh-sungguh namun hambatan masih ada dalam penerapannya. Sebab keberhasilan penerapan dalam proses pembauran seluruhnya diserahkan kepada pelaku asimilasi yaitu antara masyarakat lokal dan masyarakat Tionghoa Indonesia.

Upaya terus dilakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam proses pembauran dengan mewujudkan terjadinya penyerapan nilai oleh berbagai masyarakat termasuk mengenai keberlangsungan proses berbaurnya antara masyarakat keturunan dengan masyarakat lokal. Memperbanyak frekuensi berlangsungnya komunikasi dalam wadah-wadah kebersamaan ditempuh untuk mengurangi berperannya wadah yang berciri etnik serta eksklusif. Melalui titik temu pergaulan di segala bidang kehidupan maka terwujud proses pembauran yang cepat. Sedangkan perkawinan campur merupakan salah satu buah dari pergaulan antara dua kelompok masyarakat yang berbeda. Langkah-langkah lainnya dengan mengadakan program peningkatan peran RT/RW dalam proses pembauran sebagai upaya peningkatan pembauran di lingkungan pemukiman dengan materi pokok yang mempersatukan para warga dalam kehidupan pemukiman RT/RW yaitu pemasyarakatan serta mekanisme RT/RW, pemasyarakatan pembangunan serta gotong royong.³² Dengan upaya tersebut maka proses pembauran skala mikro akan lebih efektif melalui peranan RT/RW.

3.2. Strategi Relasi BAKOM-PKB dengan Lembaga Masyarakat Tionghoa Muslim dalam Upaya Proses Asimilasi

BAKOM-PKB dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga semi pemerintah yang menganjurkan asimilasi memiliki relasi yang dekat dengan lembaga masyarakat Tionghoa Muslim yang ada pada saat itu. Hal yang menjadikan perbedaan antara

30. Sudibyo, Djisman Simanjuntak, and Haryoseputro, *Bersatu Bergegas Menuju Indonesia Unggul: 30 Tahun Bakti Prasetiya Mulya Bagi Pencerdasan Bangsa* (Serpong: Yayasan Prasetiya Mulya, 2011).

31. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Sosial Politik, *Pedoman Pelatihan Pembauran Bangsa* (Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Sosial Politik, 1993), 4-5.

32. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Sosial Politik, *Pedoman Pelatihan Pembauran Bangsa*, 43-44.

pendahulunya LPKB dalam menerapkan kebijakan asimilasi, BAKOM-PKB memiliki penekanan yang cenderung lebih besar terhadap Islam sebagai saluran asimilasi. Meski memiliki kecenderungan demikian bukan berarti BAKOM-PKB merupakan organisasi khusus front Islam. Para pengurusnya merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai agama serta afiliasi politik.³³ Meski demikian, dalam terbitan berkala yang berjudul *Majalah Pembauran*, konten-kontennya mayoritas memuat berita mengenai peralihan keagamaan ke dalam agama Islam.³⁴

Relasi BAKOM-PKB dengan Lembaga masyarakat Tionghoa Muslim semasa pemerintahan Orde Baru di antaranya adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). PITI berdiri pada tahun 1961 merupakan perpaduan dari Persatuan Tionghoa Muslim (PTM) di Bengkulu dipimpin oleh Kho Goan Tjin dan Persatuan Islam Tionghoa (PIT) di Jakarta yang dipimpin oleh Abdul Karim Oei Tjeng Hien serta Yap A. Siong. Pada masa awal pendiriannya PITI diketuai oleh Lim Seng Lian, A. Hamid Hin sebagai sekretaris, dan Ibrahim sebagai bendahara hingga pada tahun 1967 terjadi perubahan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Tabel 1: Susunan Pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)

Jabatan	Nama	Asal Kalangan
Pembimbing	Letjen H. Sudirman	ABRI
Penasehat	Jenderal Polisi H. Sutjipto Judodihardjo	ABRI
	Brigjen H. Muchlas Rowi	ABRI
	Brigjen Pol H. Drs. Suhadi	ABRI
	Letkol H. M. Isa Edris	ABRI
	Prof. Hamka	Pribumi, Cendekiawan
	Prof. Dr. Hazairin, S.H.	Pribumi, Cendekiawan
	Prof. Dr. H. Rasyidi	Pribumi, Cendekiawan
Ketua Umum	H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien	Tionghoa Muslim
Ketua I	H. M. Yunan Helmy Nasution	Pribumi, Jurnalis
Ketua II	R. N. Ibrahim (Yong Kung Nyuk)	Tionghoa Muslim
Sekretaris Jenderal	Mayor H. Ahmad Djohansjah	ABRI
Sekretaris I	Anwar Wijaya (Oei Ie An)	Tionghoa Muslim
Bendahara I	H. M. Husein (Shia Kiau Sen)	Tionghoa Muslim
Bendahara II	M. Santoso (Ku Yong Sien)	Tionghoa Muslim
Biro Da'wah	H. A. Hamid (Soei Ngo Sek)	Tionghoa Muslim
	Rifai Djailani (Oei Tjoe Beng)	Tionghoa Muslim
Biro Pendidikan	A. Halim	Pribumi
	R. N. Ibrahim (Yong Kung Nyuk)	Tionghoa Muslim
Biro Sosial Pembantu	H. Abdul Hamid (Yap A Siong)	Tionghoa Muslim
	Pandi Wijaya	Pribumi
	A. Hamid (Him Eng Tek)	Tionghoa Muslim

33. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, 314.

34. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*.

Sumber: Abdul Karim. *Mengabdikan Agama, Nusa Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno, H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien)*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

PITI merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk memberikan dakwah kepada masyarakat Tionghoa serta mempromosikan hubungan baik antara masyarakat Tionghoa dan Muslim Indonesia. Selama periode awal, seluruh anggota PITI berasal dari masyarakat Tionghoa. Hal ini menjadi momentum untuk mengekspresikan identitas Tionghoa Muslim hingga masa pemerintahan Orde Baru.³⁵ Pada masa tersebut, masyarakat Tionghoa sulit mengekspresikan budayanya sendiri. Ini diakibatkan oleh tekanan dari Pemerintah baik di bidang pendidikan, sosial, agama, dan budaya. Di lain pihak, Orde Baru justru juga memberlakukan program asimilasi yang menyarankan peleburan etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal. Ini merupakan upaya dari Orde Baru untuk melakukan kontrol terhadap organisasi ini. Tentu saja ini berdampak pada PITI, dimana salah satu dampak paling besar adalah perubahan struktur kepengurusan yang kemudian diisi oleh pihak militer dan berbagai etnis.³⁶

Intervensi pemerintahan Orde Baru di dalam internal PITI tidak hanya berhenti sampai di situ. Pemerintah dengan gencarnya melarang segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas ketionghoan baik dalam simbol, bahasa, maupun lembaga pendidikan. Hal ini dianggap sebagai hambatan bagi keberlangsungan pembauran. Pada tahun 1972, PITI dilarang menggunakan kata "Tionghoa" dalam nama kepanjangan PITI. Pemerintah menganggap bahwa Islam merupakan agama yang universal sehingga organisasi PITI tidak seharusnya bersifat eksklusif dengan menekankan Islam khusus Tionghoa.³⁷ Sebagai tanggapan dari pelarangan tersebut, pada tanggal 5 Desember 1972 PITI menyatakan untuk membubarkan diri. Namun, bukan berarti organisasi ini hilang selamanya. Pada tanggal 15 Desember 1972 melalui sidang khusus PP PITI kemudian mengirimkan surat kepada Jaksa Agung bahwa dalam rangka aktif mengabdikan terhadap agama, bangsa, dan negara, telah didirikan sebuah organisasi yang khusus bekerja dalam bidang dakwah dan pendidikan bernama Pembina Iman Tauhid Islam (PITI). Langkah ini dilakukan dengan alasan bahwa dakwah di kalangan masyarakat Tionghoa tidak boleh berhenti.³⁸

Dakwah Islam yang tidak berhenti di kalangan masyarakat Tionghoa didukung oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun organisasi terkait. Hal ini ditunjukkan dengan adanya relasi antara PITI dan BAKOM-PKB melalui kolaborasi dalam sebuah serangkaian kegiatan keagamaan. Pada tanggal 11 Maret 1979, misalnya, diselenggarakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini memiliki ciri khas yaitu hadirnya masyarakat pribumi dan non pribumi terutama dari kalangan Tionghoa Indonesia. Perayaan ini diselenggarakan atas inisiatif bersama antara BAKOM-PKB dan PITI. Ketua BAKOM-PKB, Sindhunatha di dalam perayaan tersebut memaparkan bahwa unsur agama, khususnya Islam, merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan pembauran. Selain itu dalam sambutannya, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Burhani Tjokrohandoko menjelaskan bahwa penghayatan kesatuan bangsa merupakan konsep Islam dan Islam mengajarkan persamaan.³⁹ Dengan demikian, melalui perayaan ini

35. Fahmi Rafika Perdana, "Integrasi Sosial Muslim-Tionghoa Studi Atas Partisipasi PITI DIY Dalam Gerakan Pembauran," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 9, no. 2 (2015): 105–120.

36. Hew Wai Weng, *Chinese Ways of Being Muslim: Negotiating Ethnicity and Religiousity in Indonesia* (Denmark: NIAS Press, 2018), 48-51.

37. Aftonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Identitas* (Depok: Penerbit Kepik, 2012), 103.

38. Abdul Karim, *Mengabdikan Agama, Nusa Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno, H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien)* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 201-202.

39. Junus Jahja, *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa: Rekaman Dakwah Islamiyah 1979-1984* (Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984),

tampak terlihat mengaburkan upaya asimilasi menjadi Islamisasi masyarakat Tionghoa Indonesia. Ini tentu bertentangan pada fakta bahwa BAKOM-PKB sebetulnya merupakan badan yang bersifat nasional, yang para pengurusnya memiliki keragaman latar belakang. Berbagai kegiatan yang dihadiri BAKOM-PKB yang diselenggarakan organisasi Muslim Tionghoa tidak serta merta menjadikan BAKOM-PKB dapat memonopoli suatu agama. Fokus organisasi ini kemudian mendapat reaksi dari masyarakat karena agak melenceng dari upaya asimilasi.

Selain PITI, lembaga masyarakat Muslim Tionghoa lain turut berpartisipasi dalam mensukseskan gerakan asimilasi seperti Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Yayasan ini didirikan oleh Junus Jahja tepat di tahun 1981 bersama rekan-rekannya yang memeluk Islam yaitu Drs. H. Khozyn Arief, Drs. Moh. Budyatna, MA, Hamgas, dan R.H. Sudrajat Brotokuntjoro. Pendirian yayasan ini dirasa perlu karena BAKOM-PKB memiliki lingkup nasional dalam gerakan asimilasi.⁴⁰ Junus Jahja sebagai ketua dari yayasan yang merupakan seorang mualaf Tionghoa serta menjadi pengurus di BAKOM-PKB. Dirinya aktif dalam mendakwahkan Islam sebagai jalan yang tepat dalam berasimilasi bagi masyarakat Tionghoa Indonesia khususnya generasi muda pengusaha Tionghoa Indonesia.

Yayasan Ukhuwah Islamiyah yang didirikan Junus Jahja ini memang tidak sekedar focus pada dakwah. Pada tahun 1983, yayasan ini merekrut banyak pengusaha Indonesia dan mengorganisir kelompok bisnis dengan nama Kontak Bisnis Ukhuwah Islamiyah. Yayasan ini menyediakan kesempatan bagi penduduk asli Muslim untuk belajar berbisnis dari pengusaha Tionghoa Indonesia dan membantu pengusaha Tionghoa Indonesia dalam memperluas kontak sosial dengan penduduk pribumi muslim.⁴¹ Yayasan Ukhuwah Islamiyah mempunyai beragam proses dalam upaya mengenalkan Islam. Selain memadukan unsur ekonomi, yayasan ini juga mengadakan pertemuan antara masyarakat Muslim dan masyarakat Tionghoa. Selain itu yayasan ini mendirikan sebuah majelis taklim dalam rangka mempercepat proses pembauran. Majelis taklim ini dinamakan sebagai Majelis Taklim Pembauran yang diselenggarakan sebulan sekali di rumah seorang keturunan Muslim Tionghoa.⁴² Dengan demikian, yayasan ini dalam prosesnya akan lebih banyak mempelajari Islam dengan memadukan unsur pengembangan dakwah islam serta ekonomi yang menjadi solusi akan kesenjangan ekonomi antara masyarakat Tionghoa Indonesia dan masyarakat lokal.

3.3. Tantangan Organisasi BAKOM-PKB dalam Naungan Departemen Dalam Negeri

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Departemen Dalam Negeri merupakan lembaga pemerintah utama yang bertugas untuk menyusun serta melaksanakan undang-undang mengenai kebijakan tentang etnis Tionghoa Indonesia. Hal ini berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 240 tahun 1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing. Berdasarkan BAB II mengenai Pembinaan Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, pada pasal 7 disebutkan bahwa pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan pokok yang menyangkut warga negara Indonesia keturunan asing dibebankan kepada Menteri Dalam Negeri.⁴³ Departemen Dalam Negeri dengan cepat menjalankan perannya sebagai

40. Junus Jahja, *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa: Rekaman Dakwah Islamiyah 1979-1984*, 328.

41. Chiou Syuan Yuan, "Junus Jahja and Chinese Indonesian Muslims In Indonesia," in *After Migration and Religious Affiliation Religions, Chinese Identities and Transnational Networks* (Singapore: World Scientific Publishing, 2014), 273–307.

42. M. Muwafiq Zamroni and Sri Mastuti Purwaningsih, "Islamisasi Masyarakat Tionghoa Surabaya Masa Orde Baru," *Avatara Journal Pendidikan Sejarah* 7, no. 1 (2019): 1–10.

43. Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 Tahun 1967 Tentang Kebidjaksanaan Pokok Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing*, 1967.

pelaksana kebijakan bagi masyarakat Tionghoa Indonesia sejak diberlakukannya keputusan tersebut pada tahun 1967. Departemen Dalam Negeri menjadi pilar yang paling kuat bersama militer untuk menjaga serta mengamankan stabilitas politik dalam negeri. Keduanya secara ketat mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).⁴⁴ Dengan dasar tersebut Departemen Dalam Negeri turut menjadi lembaga utama yang melanjutkan penyelesaian masalah masyarakat Tionghoa.

Pada tahun 1975 terdapat Direktorat Jenderal Sosial Politik (DIRJENSOSPOL) yang merupakan hasil dari reformasi struktural Departemen Dalam Negeri. Dirjen ini memiliki tugas sebagai poros yang mengawasi isu-isu SARA yang sensitif. Dirjen ini tidak hanya berkantor di Departemen Dalam Negeri, namun terdapat di setiap kantor daerah. Pada tahun 1977, Kantor Departemen Dalam Negeri tingkat provinsi, kota, dan kabupaten mendirikan divisi SOSPOL yang masing-masing memiliki Badan Kesatuan Bangsa (KESBANG) yang menangani pembinaan kesatuan bangsa dan masalah Tionghoa. Jaringan SOSPOL kemudian semakin dilengkapi dengan pendirian BAKOM-PKB sebagai mata rantai yang mengurus masalah masyarakat Tionghoa Indonesia.

Status BAKOM-PKB sebagai organisasi semi pemerintah bertugas membantu kegiatan Departemen Dalam Negeri, para gubernur, dan Direktorat Jenderal Sosial Politik masing-masing provinsi. Status tersebut menandakan bahwa anggota di dalam BAKOM-PKB yang ditunjuk bukan bagian dari pegawai negeri resmi, akan tetapi anggaran dalam menjalankan tugas didukung oleh Departemen Dalam Negeri atau kantor pemerintah provinsi. Dengan demikian dalam mengemban tugas dan fungsinya selaku organisasi, BAKOM-PKB bernaung di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri dan memiliki tanggung jawab kepada Departemen Dalam Negeri. Misi yang dibawa oleh BAKOM-PKB adalah untuk mempercepat tercapainya asimilasi di kalangan masyarakat. Sebagai organisasi pembantu Departemen Dalam Negeri, BAKOM-PKB harus mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, Departemen Dalam Negeri mengangkat pemimpin Tionghoa Indonesia dari komunitas lokal untuk BAKOM-PKB. BAKOM-PKB menjadi sarana konsultasi bagi masyarakat Tionghoa Indonesia yang memerlukan solusi dari permasalahan yang mungkin terjadi seperti melakukan penyelidikan terhadap kerusuhan lokal baik dari pihak masyarakat Tionghoa maupun pribumi. Semua informasi tersebut yang berkaitan dengan penyebab gangguan sosial harus dilaporkan kepada Departemen Dalam Negeri.⁴⁵

Pasca dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada akhir tahun 1977, pemerintah daerah mendirikan institusi sosial sejenis yaitu bakom-bakom di tingkat daerah seperti tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Wadah-wadah bakom baik yang berada di pusat maupun daerah merupakan kelompok kerja pri-nonpri tanpa mengenal anggota biasa. Hal ini disebabkan Bakom merupakan badan yang tidak operasional dan lebih bertindak sebagai pemberi masukan kepada Menteri Dalam Negeri di tingkat pusat dan kepada kepala daerah di tingkat daerah. Masukan itu kemudian ditampung oleh aparat pemerintah. Di tingkat pusat di bentuk Pokja Interdep (Kelompok Kerja antar Departemen) di pokja-pokja ini mengadakan spesialisasi lagi menurut bidang-bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya pokja-pokja yang menentukan berbagai masukan dari BAKOM-PKB itu. Setelah prosedur ini maka tugas Bakom sebagai penasihat berakhir.⁴⁶ Di samping itu Bakom melakukan tugas lainnya seperti

44. Nobuhiro Aizawa, "Chapter Three: Assimilation, Differentiation, and Depoliticization: Chinese Indonesians and The Ministry Home Affairs in Suharto's Indonesia," in *Chinese Indonesians and Regime Change*, vol. 4 (Leiden: Brill, 2011), 55.

45. Nobuhiro Aizawa, "Chapter Three: Assimilation, Differentiation, and Depoliticization: Chinese Indonesians and The Ministry Home Affairs in Suharto's Indonesia."

46. Junus Jahja, *Catatan Seorang WNI: Kenangan, Renungan, Dan Harapan*, 145.

memberikan penerangan-penerangan, mengadakan tukar pikiran dengan berbagai kelompok masyarakat, dan lain-lainnya.

Setelah pembentukan institusi besar seperti Dirjen SOSPOL, KESBANG, dan jaringan-jaringan Bakom di daerah, maka langkah berikutnya adalah menyiapkan undang-undang yang bertujuan untuk mengasimilasikan masyarakat Tionghoa Indonesia. Pada tahun 1980, Dirjen SOSPOL mengadakan program peningkatan yang mengarahkan masyarakat Tionghoa untuk melakukan survei dan pelaporan terkait situasi asimilasi serta masalah Tionghoa di enam belas provinsi di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Menurut survei ini bahwa populasi etnis Tionghoa mencapai lebih dari 40 persen di daerah tersebut, sehingga dianggap signifikan sebagai daerah-daerah untuk pelaksanaan program asimilasi.⁴⁷ Tujuan survei ini adalah untuk merekam segala masalah masyarakat. Kemudian langkah berikutnya adalah melatih para kepala daerah tentang tata cara melapor ke kantor Dirjen SOSPOL setempat. Hal ini memiliki tujuan utama yaitu membentuk jaringan pelaporan nasional yang menghasilkan informasi serta statistik mengenai kehidupan masyarakat Tionghoa Indonesia dan melihat hubungan antara pri-non pribumi di daerah.

Gerakan asimilasi secara besar-besaran sejak tahun 1970-an terus dilaksanakan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri dan DIRJENSOSPOL yang juga dibantu oleh BAKOM-PKB. Namun gerakan tersebut tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Perbedaan misi diadakannya gerakan asimilasi tersebut memicu terhambatnya asimilasi yang seharusnya mencapai hasil maksimal. Departemen Dalam Negeri memiliki misi asimilasi untuk menjaga ketertiban politik dan sosial demi keberhasilan pemilihan umum. Sedangkan BAKOM-PKB yang diketuai oleh Sindhunatha memiliki misi asimilasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Tionghoa Indonesia agar terjamin akses dalam segala bidang kehidupan serta mencegah terjadinya konflik sosial yang merugikan. Departemen Dalam Negeri cenderung memproyeksikan asimilasi untuk mencegah kemungkinan adanya sumber oposisi politik yang menghalangi pemilihan umum presiden. Departemen Dalam Negeri tidak terlalu tertarik dengan masalah asimilasi. Baginya yang terpenting adalah depolitisasi masyarakat Tionghoa Indonesia dan ketersediaan informasi tentang yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa Indonesia melalui jalinan kontak komunikasi dengan BAKOM-PKB.⁴⁸

Misi yang ditunjukkan oleh Departemen Dalam Negeri sesungguhnya mencerminkan ciri khas pemerintahan Orde Baru, yakni melakukan depolitisasi massa dan politik yang dijalankan oleh sebagian kecil golongan elit masyarakat. Adanya kontrol dari sekelompok orang disebut selaku kelompok utama di sekitar Presiden Soeharto pada pertengahan 1970-an terdiri dari Jenderal Maraden Panggabean, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Panglima ABRI; Letnan Jenderal Amir Machmud, Menteri Dalam Negeri; Letnan Jenderal Yoga Sugama, Kepala Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN); Letnan Jenderal Ali Murtopo, Wakil Kepala BAKIN; Laksamana Sudomo, Kepala Staf Kopkamtib; Mayor Jenderal L.B. Moerdani, Asisten Intelijen (Asintel) Menteri Pertahanan; Letnan Jenderal Sudharmono, Menteri Sekretaris Negara; Letnan Jenderal Darjatmo, Kepala Staf urusan nonmiliter Menteri Pertahanan; Letnan Jenderal Ibnu Sutowo, Presiden Direktur Pertamina. Melalui tokoh-tokoh ini, pemerintahan Orde Baru dapat memproyeksikan otoritasnya ke seluruh jajaran birokrasi. Hal ini tercermin dari integrasi kepemimpinan

47. Nobuhiro Aizawa, "Chapter Three: Assimilation, Differentiation, and Depoliticization: Chinese Indonesians and The Ministry Home Affairs in Suharto's Indonesia.", 59.

48. Nobuhiro Aizawa, "Chapter Three: Assimilation, Differentiation, and Depoliticization: Chinese Indonesians and The Ministry Home Affairs in Suharto's Indonesia.", 64

dengan penempatan perwira militer ke dalam birokrasi sipil seperti Menteri Dalam Negeri yaitu Amir Machmud yang juga termasuk dalam barisan kelompok ini.⁴⁹ Kolaborasi antara Departemen Dalam Negeri dan militer semakin memperketat kontrol tersebut terutama dalam masalah masyarakat Tionghoa.

Kontrol ketat terhadap masyarakat Tionghoa Indonesia yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri bersama militer tidak serta merta menyurutkan perhatian mereka terhadap adanya asimilasi yang tengah diberlakukan secara besar-besaran. Menteri Dalam Negeri Amir Machmud sebagai pelindung tetap memberikan perhatian penuh terhadap gerakan asimilasi dan BAKOM-PKB. Ini tampak dalam pertemuan yang diadakan keduanya pada awal tahun 1979 untuk membahas perihal laporan BAKOM-PKB. Isi dari pertemuan ini di antaranya memuat tiga poin penting, yakni percepatan usaha pembauran demi terciptanya ketahanan nasional, proses pembauran melalui langkah penyeragaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa adanya kode khusus yang membedakan, dan Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan bantuan materi lebih besar dalam rangka peningkatan usaha BAKOM-PKB.⁵⁰

Komunikasi antara Departemen Dalam Negeri dengan BAKOM-PKB pun berlangsung dengan lancar. Adanya pelaporan rutin tahunan yang dilakukan oleh BAKOM-PKB Pusat kepada Departemen Dalam Negeri adalah upaya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai badan yang bernaung di bawahnya. Pelaporan ini memuat unsur evaluasi, analisa, serta rekomendasi kegiatan yang diajukan kepada pemerintah khususnya Departemen Dalam Negeri. Pada pelaporan kurun waktu dua tahun pertama sejak berdirinya BAKOM-PKB, yaitu mulai tanggal 28 Oktober 1977 hingga 28 Oktober 1979, diuraikan evaluasi serta analisa yang memuat beberapa poin penting di antaranya penajaman masalah pribumi dan non pribumi sejak akhir Pembangunan Lima Tahun I (Pelita I) hingga permulaan Pelita II, sikap mencurigai semua masyarakat Tionghoa tanpa memandang status warga negara masih terjadi di kalangan pemerintah, kebijakan ekonomi pemerintah yang memihak masyarakat Tionghoa semakin membuat kehidupan mereka menjadi eksklusif hingga merasa di "Cinakan" kembali oleh pemerintah. Evaluasi dan analisa tersebut dinilai menjadi hambatan yang gawat dalam proses pembauran. Maka, selain menguraikan evaluasi beserta analisisnya, BAKOM-PKB juga memberikan rekomendasi yang menjadi solusi bagi pemerintah. Adapun rekomendasinya yaitu agar pemerintah membentuk sebuah badan baru bernama Badan Koordinasi Usaha Pembauran Bangsa yang berkedudukan langsung di bawah presiden sebagai upaya melancarkan program konkrit dalam Krida V⁵¹ yang memiliki tujuan untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam badan tersebut, BAKOM-PKB menjadi anggota tetap bersama unsur-unsur dalam departemen maupun lembaga pemerintah. Kemudian proses pembauran harus dilakukan dengan tiga pelaku utama meliputi pemerintah, masyarakat pribumi, dan masyarakat Tionghoa. Bagi pemerintah agar dapat memperlakukan warga negara tanpa perbedaan dalam hak dan kewajiban begitu pun dengan masyarakat pribumi dan non pribumi. Di samping itu, BAKOM-PKB bersama Badan Koordinasi Usaha Pembauran melakukan program nasional yang efektif dalam usaha pembauran bangsa.⁵² Dengan demikian, seluruh elemen terlibat mulai dari pemerintah, masyarakat hingga badan yang bertugas dalam mensukseskan percepatan usaha pembauran ini.

49. Norman Joshua, "Patrimonialisme Dalam Pemerintahan Orde Baru Di Indonesia, 1965-1998," *Academia* (2013), 4-6.

50. BAKOM-PKB, "Mendagri Terima Pengurus BAKOM PKB," *Pembauran*, February 1979.

51. BAKOM-PKB, "Evaluasi, Analisa Dan Rekomendasi Dari Kegiatan BAKOM-PKB: 28 Oktober 1977-28 Oktober 1979," *Pembauran*, Desember 1979.

52. BAKOM-PKB, "Evaluasi, Analisa Dan Rekomendasi Dari Kegiatan BAKOM-PKB: 28 Oktober 1977-28 Oktober 1979."

4. Penutup

Konsepsi Asimilasi di Indonesia erat kaitannya dengan keberadaan Etnis Tionghoa. Keberadaan Etnis Tionghoa dalam setiap masa menjadi suatu permasalahan sosial yang serius dalam setiap pemerintahan. Permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi tentu melahirkan berbagai kebijakan yang diberlakukan setiap pemerintahan yang sedang berkuasa. Pemerintahan Orde Baru dalam hal ini sangat ketat dalam memberlakukan kebijakan asimilasi di tengah masyarakat Indonesia. Beragam cara ditempuh pemerintah dalam mensukseskan kebijakan ini salah satunya adalah memberikan dukungan penuh atas berdirinya sebuah badan yang memiliki kesamaan visi dengan pemerintah dalam kebijakan asimilasi. Badan ini memiliki nama Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 1977 serta disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 1977. Badan ini merupakan wadah pemikir dan penelitian untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai masalah pembauran.

BAKOM-PKB dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi massa merupakan badan yang menyambungkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam urusan pembauran. Badan ini khusus memberikan penerangan kepada masyarakat terkait gagasan pembauran melalui diskusi, pelatihan, dan penyebaran gagasan melalui media cetak. Badan ini memberikan kontribusinya dalam usaha pembauran dengan menekankan aspek pembauran dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Badan ini selalu mengadakan evaluasi, rekomendasi serta pelaporan terhadap pemerintah terkait kondisi dan permasalahan dalam perkembangan pembauran di masyarakat melalui pekan komunikasi yang merupakan agenda tahunan Bakom. Semula penerapan asimilasi di dalam badan ini masih terpengaruh dengan gerakan asimilasi terdahulu. Sejak kehadiran Orde Baru, istilah kebijakan asimilasi bergeser menjadi kebijakan pembauran yang cenderung lebih universal.

BAKOM-PKB memiliki relasi yang dekat dengan lembaga masyarakat Muslim Tionghoa dalam menerapkan kebijakan asimilasi. Hubungan ini tentu dilandasi karena kesamaan visi dalam usaha membaurkan masyarakat meskipun memiliki jalan yang berbeda. Lembaga masyarakat Muslim Tionghoa cenderung melakukan dengan jalan islamisasi. Namun BAKOM-PKB sebagai organisasi massa yang universal menempuh berbagai jalan yang menekankan kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) berdiri pada tahun 1961 oleh Haji Abdul Karim Oei merupakan lembaga yang mendapatkan dukungan dari BAKOM-PKB. Berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh PITI selalu melibatkan BAKOM-PKB. Selain itu, terdapat Yayasan Ukhuwah Islamiyah yang berdiri pada tahun 1981 oleh Junus Jahja yang juga seorang pengurus dalam BAKOM-PKB. Yayasan ini menghimpun generasi muda pengusaha Tionghoa Indonesia dengan tujuan mendakwahkan Islam sebagai jalan yang tepat dalam berasimilasi bagi masyarakat Tionghoa Indonesia.

Daftar Pustaka

Sumber Primer

- Bagian Evaluasi dan Laporan Statistik. *Statistik Indonesia 1995: Statistical Yearbook of Indonesia 1995*. Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1995.
- BAKOM-PKB. "Bahan-Bahan Pemikiran Mengenai Bidang-Bidang BAKOM-PKB." *Pembauran*, June 1979.
- — —. "Evaluasi, Analisa Dan Rekomendasi Dari Kegiatan BAKOM-PKB: 28 Oktober 1977-28 Oktober 1979." *Pembauran*, Desember 1979.

- — —. "Mendagri Terima Pengurus BAKOM PKB." *Pembauran*, February 1979.
- — —. "Peraturan Dasar Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa." *Pembauran: Buletin Berkala*, June 1979.
- Biro Pusat Statistik. *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi: Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Penduduk 1980*. Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1981.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Sosial Politik. *Pedoman Pelatihan Pembauran Bangsa*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Sosial Politik, 1993.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. *Himpunan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (1960-1988)*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1989.
- Presiden Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 Tahun 1967 Tentang Kebidjaksanaan Pokok Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing*, 1967.

Artikel dan Buku

- Abdul Karim. *Mengabdikan Agama, Nusa Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno, H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien)*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Afif, Aftonul. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Identitas*. Depok: Penerbit Kepik, 2012.
- Babari. "Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pembauran Bangsa." *Analisa CSIS: Pembauran dan Tantangannya*, 1984.
- Chiou Syuan Yuan. "Junus Jahja and Chinese Indonesian Muslims In Indonesia." In *After Migration and Religious Affiliation Religions, Chinese Identities and Transnational Networks*, 273–307. Singapore: World Scientific Publishing, 2014.
- Coppel, Charles. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Dawis, Aimee. *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Fahmi Rafika Perdana. "Integrasi Sosial Muslim-Tionghoa Studi Atas Partisipasi PITI DIY Dalam Gerakan Pembauran." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 9, no. 2 (2015): 105–120.
- Hew Wai Weng. *Chinese Ways of Being Muslim: Negotiating Ethnicity and Religiousity in Indonesia*. Denmark: NIAS Press, 2018.
- Huda, Samsul. "Orang Indonesia Tionghoa Dan Persoalan Identitas." *Kontekstualita* 25, no. 1 (2010): 165–174.
- Jahja, Junus. *Garis Rasial Garis Usang: Lika-Liku Pembauran*. Jakarta: BAKOM-PKB Pusat, 1983.
- — —. *Islam Di Mata WNI*. Jakarta: Yayasan H. Abdulkarim Oei, 1993.
- Junus Jahja. *Catatan Seorang WNI: Kenangan, Renungan, Dan Harapan*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1989.
- — —. *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa: Rekaman Dakwah Islamiyah 1979-1984*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984.

- M. Muwafiq Zamroni and Sri Mastuti Purwaningsih. "Islamisasi Masyarakat Tionghoa Surabaya Masa Orde Baru." *Avatara Journal Pendidikan Sejarah* 7, no. 1 (2019): 1–10.
- Mega Christina. *SBKRI No Way Untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Yappika, 2006.
- Nobuhiro Aizawa. "Chapter Three: Assimilation, Differentiation, and Depoliticization: Chinese Indonesians and The Ministry Home Affairs in Suharto's Indonesia." In *Chinese Indonesians and Regime Change*, 4:47–64. Leiden: Brill, 2011.
- Norman Joshua. "Patrimonialisme Dalam Pemerintahan Orde Baru Di Indonesia, 1965-1998." *Academia* (2013). https://www.academia.edu/download/31343343/Patrimonialisme_dalam_Orde_Baru.pdf.
- Prasetyadji. *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis: Merintis Jalan Menuju Kesetaraan Dan Penyelesaian Kewarganegaraan Tionghoa Sejak Tahun 1945*. Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, 2011.
- Ridwan Saidi. *Baba Bisa Menjadi Indonesier: Bung Hatta, Liem Koen Hian, Dan Sindhunatha, Menyorot Masalah Cina Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1988.
- — —. "Sejarah Perkembangan BAKOM-PKB Dalam Penerapan Kebijakan Asimilasi Dan Keterkaitannya Dengan Lembaga-Lembaga Muslim Tionghoa," July 29, 2021.
- Santoso, Tony Suryo. *Sekitar Pembauran Bangsa Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66, 1985.
- Sudibyoy, Djisman Simanjuntak, and Haryoseputro. *Bersatu Bergegas Menuju Indonesia Unggul: 30 Tahun Bakti Prasetiya Mulya Bagi Pencerdasan Bangsa*. Serpong: Yayasan Prasetiya Mulya, 2011.
- Suryadinata, Leo. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Press, 1984.